

# POLISI DAN TANTANGAN PERDAGANGAN BEBAS TAHUN 2015

Achmad Deni Daruri  
President Director Center for Banking Crisis

**TUGAS Polisi Republik Indonesia (Polri) menjadi sangat penting ketika perekonomian memasuki era perdagangan bebas. Jika perekonomian Indonesia gagal bersaing dalam era tersebut maka akan muncul kemiskinan di Indonesia yang semakin sulit dihapuskan sehingga potensi kejahatan ekonomi justru semakin meningkat di masa depan. Sejauh mana perekonomian Indonesia dapat bersaing tergantung dari kemampuan daya saing perekonomian itu sendiri.**

**A**SET ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (mineral berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya) yang dimiliki oleh negara dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah (sebisanya) impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong ekspor (dengan banyak insentif) dan mengurangi impor (biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar).

Masalahnya adalah mampukah industri nasional bersaing dalam era perdagangan bebas? Angkatan kerja dunia pada tahun 2005

adalah 2,8 milyar dimana 2,25 milyar merupakan angkatan kerja yang berasal dari Negara berkembang termasuk China dan India. Dengan runtuhnya ideologi komunis maka masuknya China dan India pada system kapitalisme dunia sangat berkontribusi kepada terjadinya eksese penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja dunia khususnya yang berk keahlian rendah. Dalam ilmu ekonomi internasional bertimpahnya faktor produksi tertentu yang dimiliki oleh Negara tertentu akan mempengaruhi keunggulan dalam memproduksi barang (termasuk jasa) yang dihasilkan oleh Negara tersebut yang menggunakan faktor produksi yang berlimpah tersebut, dibandingkan dengan produksi Negara lainnya yang tidak memiliki kelimpahan dalam faktor produksi tersebut (*Teori Stolper-Samuelson*). Konsekuensinya (secara teori), industri padat karya di Indonesia akan mendapatkan ancaman yang sangat serius dari industri padat karya di India dan China.

Strategi tingkat substitusi dan komplementer produk juga dipakai oleh India dalam merobos pasar Uni Eropa, dimana India bekerja sama dengan industri di Jerman Timur dalam rangka untuk menghadapi persaingan yang tinggi dari Negara Uni Eropa lainnya terhadap industri padat karya India (tindak lanjut pertemuan Perdana Menteri Manmohan Singh dan Chancellor Angela Merkel pada Oktober 2007 yang lalu di India). Tanpa strategi seperti itu maka industri padat karya akan mengalami ancaman penurunan *terms of trade* (TDR 2002) dan ancaman deindustrialisasi, dimana nilai ekspor yang meningkat justru disertai oleh penurunan nilai tambah.

Penurunan nilai tambah dari sektor industri termasuk sektor industri padat karya terjadi



akibat Negara sedang berkembang menerapkan kebijakan ekonomi yang liberal dimana hambatan tarif dan non tarif secara sistematis dihapus melalui berbagai dimensi perjanjian perdagangan multinasional seperti WTO yang juga disokong oleh IMF dan Bank Dunia, serta perjanjian bilateral maupun regional. Studi yang dilakukan oleh UNCTAD (2002, 2003, 2004, dan 2005) memperlihatkan bahwa keberhasilan Negara maju dalam industrialisasi disebabkan oleh perlindungan tarif dan non tarif terhadap sektor industrinya dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga sektor industrinya dapat mencapai tahap "dewasa".

Dalam tahap yang "dewasa" itu, *trade liberalization* dapat membantu sektor industri tersebut untuk menjadi lebih efisien, selain *trade liberalization* juga mematikan para kompetitor industri di Negara berkembang yang baru tumbuh secara simultan. Faktor penyebab lainnya adalah karena ekspor juga telah menyebabkan pengalihan investasi input material kepada aktivitas ekspor tersebut, dan



tidak terjadinya *supply effect* akibat *import compression* untuk membayar hutang. *Income effect* yang diharapkan terjadi dari ekspor juga kerap kali tidak terjadi karena terjadinya eskpatriasi modal (keuntungan) dan juga upah keluar negeri yang terjadi secara masif.

Contoh masih bertahannya Negara maju dalam sektor industri padat karya dapat dilihat dalam industri *footwear* (alas kaki), dimana Negara maju seperti Jepang, Spanyol dan Italia menghasilkan nilai tambah per pekerja sebesar masing-masing 51.900 dolar, 16.800 dolar dan 31.800 dolar. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya 2.600 dolar saja. Dalam industri furniture, Negara maju juga masih dapat bertahan bahkan juga memiliki nilai tambah per pekerja yang juga jauh lebih tinggi, misalnya Amerika Serikat, Jerman dan Italia dengan nilai masing-masing 66.200 dolar, 41.800 dolar dan 41.800 dolar. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya 3.900 dolar. Bahkan untuk industri furnitur ini, Amerika Serikat mempekerjakan karyawan sebesar 3,7

kali dari jumlah karyawan furniture di Indonesia (terbesar di dunia).

Terbukti bahwa industri padat karya di Negara maju bukan hanya semakin tangguh dalam era liberalisasi tetapi juga berhasil menjadi dasar pijakan bagi pembangunan industri padat modal dan teknologi. Ancaman ke depan dari industri padat karya adalah melemahnya *degree of freedom* pemerintah untuk melindungi sektor ini untuk mencapai tahap "dewasa"-nya yang pada gilirannya mampu menopang penciptaan industri berbasis modal dan teknologi melalui akumulasi penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Keberhasilan industri padat karya India dan China juga disebabkan karena kedua Negara itu telat dalam melakukan liberalisasi.

Munculnya the Non-Agricultural Market Access negotiations (NAMA) dan perjanjian perdagangan bebas dengan Negara maju yang bertujuan untuk mengurangi tariff impor dari sektor manufaktur dan sumber daya alam

akibat negara maju tidak mau menghapus tarif pertaniannya merupakan bentuk lain upaya Negara maju untuk mematikan *degree of freedom* Negara berkembang dalam melindungi sektor industrinya. Jika NAMA dan perjanjian perdagangan bebas bilateral berhasil menghapus tariff dan non tariff industri padat karya di Indonesia, maka peran pemerintah Indonesia untuk menciptakan nilai tambah melalui pembangunan industri padat karya (pada gilirannya juga termasuk juga industri padat modal dan padat teknologi) di Indonesia sudah dipastikan akan lenyap. Konsekuensinya, deindustrialisasi di Indonesia semakin tak terhindarkan!

Percepatan AFTA (Asean Free Trade Area) menjadi tahun 2015 dari 2020 harus diantisipasi dengan baik oleh perekonomian Indonesia. Richard B. Freeman (2003) menjelaskan bahwa Uni Eropa mengalami kinerja perekonomian yang buruk selama satu dekade (1992-2002) setelah menjadi pasar bersama dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya. Kanada juga mengalami pemburukan kinerja perekonomian yang terburuk setelah depresi perekonomian tahun 1940 yang lalu akibat penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement) dengan Amerika Serikat. Mexico perekonomiannya juga kolaps setelah Kongres Amerika Serikat menyetujui perjanjian NAFTA (North America Free Trade Area).

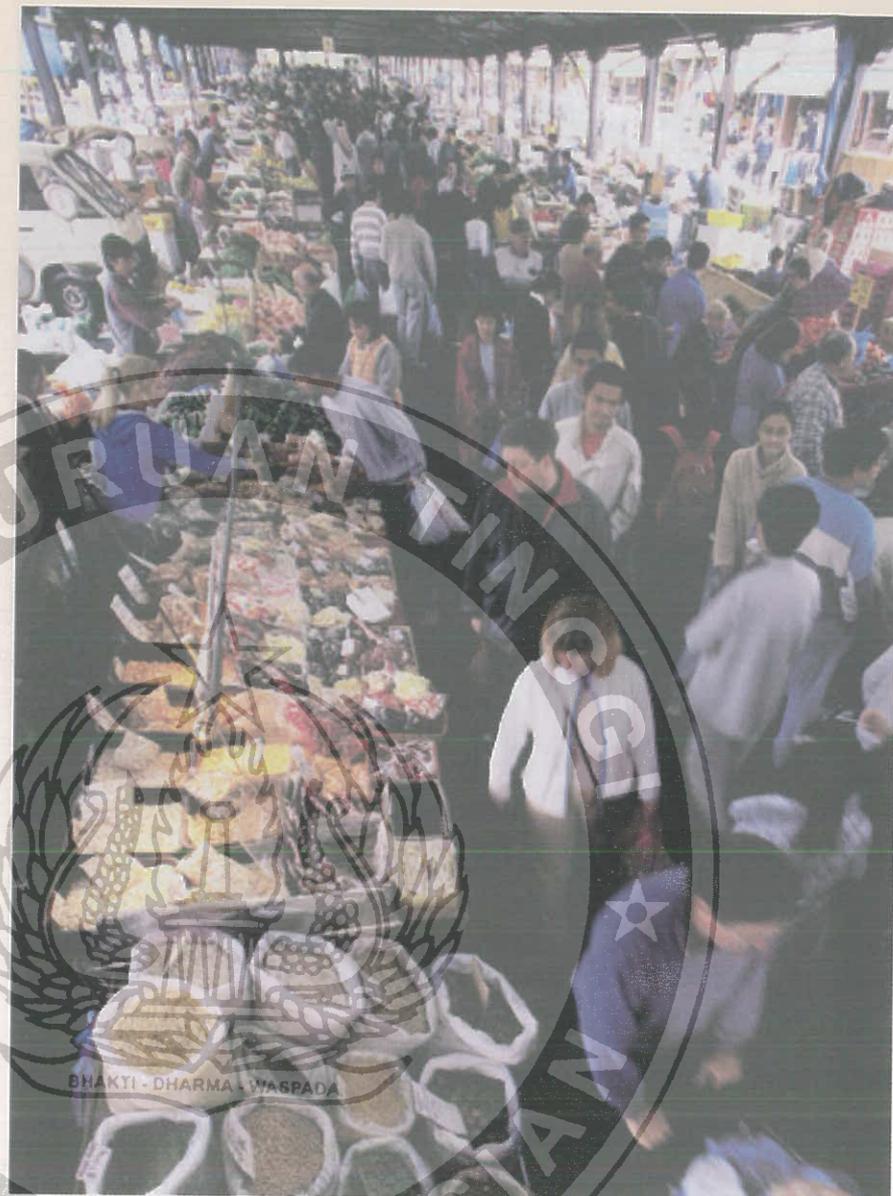
Dengan berlakunya NAFTA, Mexico menyetujui liberalisasi perdagangan secara total dari seluruh produk pertanian pada tahun 2008 (sekalipun telah disediakan periode 15 tahun penyesuaian bagi jagung dan kacang). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laura Carlsen (2008), impor jagung oleh Mexico justru meningkat tiga kali lipat setelah NAFTA diberlakukan, dan harga jagung jatuh. Padahal jagung merupakan tanaman pertanian yang ditanam diseantero Mexico). Bukan hanya jagung, tetapi impor produk pertanian lainnya seperti kedelai, unggas dan sapi juga telah meningkat mencapai 500 persen sehingga menghantam produksi domestik. Ekspor buah-buahan dan sayuran memang meningkat namun ini gagal untuk mengkompensasi kenaikan impor. Biaya yang harus ditanggung perekonomian Mexico bukan hanya itu saja tetapi juga 1,7 juta orang di pedesaan kehilangan lapangan pekerjaannya semenjak NAFTA diberlakukan. Perdagangan bebas pada tahun 2015 nanti bukan saja antara negara ASEAN tetapi juga perdagangan bebas dengan negara non ASEAN diperkirakan juga akan berlangsung. Jepang

dan ASEAN pada tanggal 8 Oktober 2003 telah sepakat untuk menerapkan Free Trade Area yang diperkirakan akan berlaku pada 2012 dan proses liberalisasinya dilakukan secara bilateral.

ASEAN dan Cina pada 4 November 2002 telah sepakat dan diperkirakan akan berlakukan Free Trade Area pada tahun 2010 (bagi negara ASEAN yang lama) dan 2015 (negara ASEAN yang baru). Perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan India juga telah ditandatangani pada 8 Oktober 2003 dan diperkirakan akan berlaku pada 2011. Selain itu, perjanjian perdagangan bebas bilateral juga telah disetujui oleh beberapa negara anggota ASEAN, seperti Singapura dengan masing-masing Amerika Serikat, Jepang, Australia, New Zealand, Jordania dan Uni Eropa (Martin Khor 2006).

Perjanjian perdagangan bebas yang bersifat tidak multilateral (non WTO) seperti Free Trade Area yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN mengandung kelemahan yang struktural bagi negara sedang berkembang itu sendiri karena, pertama, menimbulkan diversi perdagangan yang merugikan negara sedang berkembang lainnya. Kedua, daya tawar negara sedang berkembang lebih lemah ketimbang negara maju karena kapasitas perekonomian dan politik yang lemah sehingga memungkinkan negara maju untuk memasukkan agenda-agenda di luar WTO. Ketiga, prinsip WTO yang menguntungkan negara sedang berkembang seperti *special and differential treatment* dan *less than full reciprocity* tidak terdapat dalam perjanjian FTA. Selain itu, Sanya Smith 2005 mengatakan ada dua faktor lain yang merugikan negara sedang berkembang ketika melakukan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara maju. Faktor pertama adalah tidak mungkin negara maju mengurangi subsidi pertanian untuk ekspor maupun domestiknya karena FTA, sebab jika ini dilakukan maka justru akan menguntungkan negara lain non-FTA. Kedua, sudah ada Undang-Undang di negara maju yang membatasi sejauh mana negara tersebut akan membuka diri bagi area perdagangan bebas (FTA), misalnya di Amerika Serikat ada Bipartisan Trade Promotion Authority Act 2002.

Faktor lain dari sulitnya negara sedang berkembang mendapatkan keuntungan untuk menerobos pasar negara maju adalah adanya faktor lobi politik, misalnya di Amerika Serikat untuk produk pertanian dan industrinya. Lobi dari petani besar, serikat pekerja, perusahaan makanan, perusahaan lainnya hingga



kongres Amerika Serikat akan bertubi-tubi menuntut penutupan akses pasar domestik mereka dari serbuan produk asing. Perjanjian perdagangan bebas antara Singapura dengan Amerika Serikat terbukti merugikan Singapura. Singapura tidak dapat memenuhi permintaan akan garmen di Amerika Serikat karena tidak mendapatkan fasilitas bebas pajak dan bea masuk (Tommy Koh dan Chang Li Lin 2004).

Hal ini disebabkan klausul dalam perjanjian FTA yang melarang Singapura menggunakan produk benang selain produksi Singapura dan Amerika Serikat itu sendiri, akibatnya Singapura tidak dapat memanfaatkan benang impor murah dari sesama negara ASEAN

lainnya. Bukan hanya Singapura yang terbukti terkapar oleh Amerika Serikat dalam perjanjian FTA tetapi juga Kanada, Mexico (baca paragraf awal) dan Australia. Dalam kasus gula, terbukti Australia yang katanya tidak akan melakukan negosiasi FTA dengan Amerika Serikat jika kuota gula ekspor ke Amerika Serikat tidak dinaikkan harus tetap menandatangani perjanjian FTA-nya yang hasilnya memperlihatkan tidak adanya kenaikan kuota ekspor gula ke Amerika Serikat. Selain itu, dengan perjanjian FTA itu justru pangsa pasar ekspor sapinya ke Amerika Serikat juga turun. Lebih parah lagi, Amerika Serikat akan menaikkan tarif impor sapi jika harga dan volume ekspor sapi dari Australia berubah pesat (Sanya Smith

2005).

Sebastian Edwards (1989) dan Rudiger Dornbusch (1990) mengatakan bahwa liberalisasi impor yang cepat menuntut devaluasi mata uang dalam rangka mengatasi kesulitan dalam neraca pembayaran. Sementara, masuknya FDI seperti yang ditargetkan oleh AFTA justru akan menyulitkan negara ASEAN untuk melakukan koordinasi devaluasi mata uangnya karena tekanan apresiasi mata uang. Belum lagi faktor masuknya investasi portofolio yang juga dipastikan menyulitkan proses depresiasi mata uang. Penelitian UNCTAD (1999, Bab.IV) memperlihatkan bahwa liberalisasi perdagangan bagi negara sedang berkembang secara umum menyebabkan defisit neraca pembayaran, kecuali Cina.

Cina menolak liberalisasi neraca modal dan pasar mata uangnya, sehingga Cina mampu melakukan depresiasi mata uangnya secara efektif dengan melemahnya dolar pada saat itu (dengan kebijakan pegged-nya ke dolar). Berdasarkan data terakhir memperlihatkan bahwa rasio surplus perdagangan Cina terhadap Produk Domestik Bruto nya terus mengalami penurunan. Bahkan dalam sektor pertanian dimana liberalisasi terjadi dengan derasnya justru sudah terjadi defisit (Asia Times, 14 Januari 2005). Asean Free Trade Area (AFTA) dipastikan akan diiringi oleh perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan non ASEAN, dan antara masing-masing anggota ASEAN secara bilateral dengan negara non-Asean. Model perjanjian perdagangan yang seperti itu akan menimbulkan banyak kerugiannya ketimbang keuntungannya. Contohnya perjanjian perdagangan bebas bilateral antara Singapura dengan Amerika Serikat justru membuka peluang masuknya produk Amerika Serikat di ASEAN karena berlakunya AFTA, namun ekspor ASEAN ke Amerika Serikat sekalipun melalui Singapura tetap akan terkena tarif. Konsekuensinya negara anggota ASEAN lainnya akan terpaksa melakukan perjanjian perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat dengan posisi tawar-menawar yang lebih rendah lagi. Indonesia harus menyiapkan agendanya sendiri termasuk berupaya agar prioritas perjanjian perdagangan berdasarkan pendekatan multilateral seperti WTO menjadi prioritas utama bagi negara-negara anggota ASEAN!

Dengan demikian kombinasi antara deindustrialisasi dan perdagangan bebas akan menyebabkan perekonomian Indonesia tertawan oleh taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang rendah. Dalam kondisi seperti itu, ancamannya ada dua. Pertama, kemiskinan

dan kepincangan kekayaan akan menimbulkan kejahatan-kejahatan ekonomi yang bukan hanya baru tetapi juga semakin tinggi kuantitasnya. Sementara itu, pergerakan manusia antar negara semakin bebas, sehingga modus operandi kejahatan juga akan semakin kompleks. Kedua, biaya operasional Polri juga akan menghadapi kendala karena perkembangan perekonomian yang terhambat tersebut sehingga kemampuan pembiayaan melalui APBN juga semakin terbatas.

Dengan sumber daya dan dana yang terbatas sementara semakin banyak penduduk Indonesia yang tersisih secara ekonomi akibat perdagangan bebas akan membuat lingkaran setan kejahatan di Indonesia semakin sulit untuk diputus! Karena itu independensi Kepolisian Republik Indonesia harus tetap terus ditegakkan dimana alokasi anggaran negara untuk Polri harus bukan hanya memperhatikan kesejahteraan anggota Polri tetapi juga berbagai kebutuhan operasi dan latihan bagi anggota Polri. Dengan kondisi kejahatan yang akan semakin meningkat maka kebutuhan akan sumber daya manusia dari Polri bukan saja menjadi necessary condition bagi pembangunan di Indonesia tetapi juga negara-negara lainnya khususnya ASEAN. Janganlah sampai tercipta bahwa "lobang" besar kejahatan antar negara berasal dari Indonesia sehingga Indonesia bukan hanya menjadi sumber para penjahat tetapi juga "Kawah Candradimuka" berbagai kejahatan tersebut. Dengan demikian kekuatan alokasi anggaran bagi Polri bukan

hanya wajib tetapi juga harus diikuti oleh program pelatihan bagi Polri secara memadai. Bukan hanya itu, Pemerintah juga harus lebih aktif lagi membuka kerja sama dengan institusi kepolisian negara lainnya seperti dengan Scotland Yard yang memiliki reputasi kemampuan penyelidikan yang sangat baik tetapi juga profesional dalam menertibkan masyarakatnya secara manusiawi. Saatnya cetak biru dan road map Polri diarahkan untuk kompatibel dengan Scotland Yard. Scotland Yard juga sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi perdagangan bebas di Uni Eropa sehingga mereka patut untuk dijadikan referensi penting bagi pengembangan Kepolisian Republik Indonesia yang tangguh dalam menghadapi segala macam bentuk kejahatan periode perdagangan bebas.

Terlepas dari itu semua maka periode perdagangan bebas menuntut Polri untuk memiliki sumber daya manusia yang handal sehingga program rekrutmen dan pelatihan harus mendapatkan proporsi biaya yang lebih besar lagi ketimbang saat ini, sebab proporsinya masih jauh dari proporsi anggaran normal yang dimiliki oleh Scotland Yard. Program latihan yang dikembangkan oleh Scotland Yard yang menuntut kecerdasan otak dan ketangguhan fisik serta sangat intensif modal memerlukan dukungan anggaran negara secara nyata agar penerapan program kepolisian yang handal tidak terus menjadi wacana saja di Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas! \*\*\*

